

# Pengaruh Media Sosial terhadap Rasionalitas Politik Generasi Milenial pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta 2020

Muhammad Musyarroful A'la<sup>1</sup>

Diserahkan: 12 Mei 2022 | Diterima: 6 September 2022 | Diterbitkan: 26 September 2022

## Abstrak

*Artikel ini menjelaskan bagaimana pengaruh pertarungan wacana antara tagar #PolitikDinasti dan #GibranTeguh terhadap fenomena Pilkada 2020 yang memunculkan nama kandidat putra sulung presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Kehadirannya dalam kancah politik cukup menyita perhatian karena disertai dengan adanya pro kontra terhadap majunya anak sulung presiden yang erat dikaitkan dengan politik dinasti. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melihat opini masyarakat milenial kota Surakarta terhadap pengaruh pertarungan wacana di media sosial terhadap preferensi politiknya pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 silam. Terdapat tiga temuan utama dari hasil riset ini. Pertama, dominasi preferensi politik masyarakat cenderung ke arah golongan putih (golput) karena adanya pertarungan wacana kontra terhadap karakter Gibran yang lekat dengan politik dinasti. Kedua, kondisi ini kemudian diperparah dengan kandidat lawan Gibran dalam Pilkada Surakarta 2020 yang maju melalui independen yang kalah telak dalam hal elektabilitas dan tidak memanfaatkan media sosial untuk branding politiknya. Ketiga, media sosial sangat memengaruhi bagaimana*

---

<sup>1</sup> Universitas Gadjah Mada. Email: muhammad.sp@mail.ugm.ac.id.

*preferensi politik dari masyarakat milenial. Refleksi atas ketiga temuan studi ini membuktikan bahwa preferensi politik masyarakat milenial, terutama pengguna aktif media sosial, sangat dipengaruhi narasi-narasi yang berkembang di dalamnya. Seperti pertarungan wacana dalam tagar #PolitikDinasti yang merupakan narasi kontra atas berkembangnya politik dinasti yang ada di Indonesia pada waktu menjelang Pilkada Surakarta tahun 2020, dengan tagar #GibranTeguh yang merupakan narasi dukungan kampanye kandidat Gibran-Teguh sebagai upaya melawan wacana yang berkembang dalam #PolitikDinasti.*

**Kata kunci:** *media sosial; generasi milenial; preferensi politik; Gibran Rakabuming; Pilkada Surakarta 2020*

## **PENDAHULUAN**

Media sosial dalam kehidupan politik di era digital seperti sekarang ini cukup diperhitungkan keefektifannya, karena perannya yang mampu menyebarkan narasi-narasi kampanye politik dengan jangkauan yang lebih cepat dan mudah. Media sosial kerap kali dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk menjangkau seluruh kalangan masyarakat dalam menyebarkan kegiatan politik. Tetapi, karena cepat dan mudahnya media sosial menjangkau seluruh kalangan masyarakat, terutama para pengguna media sosial, hal tersebut berdampak pada polarisasi kalangan masyarakat ketika ada dua atau lebih calon elite politik menyebarkan narasi politik yang berbeda (Dalimunthe, 2018).

Berkembangnya media elektronik diawali dengan munculnya media massa sebagai sarana strategi politik yang mulai dimanfaatkan pada masa Orde Baru. Seluruh media massa memiliki peran sentral dalam memberikan legitimasi kekuasaan pada kepemimpinan Soeharto di awal bangkitnya tahun 1965, yang kemudian media massa tersebut dipolitisasi dengan berbagai kontrol dan regulasi kuat dari pemerintahan Soeharto. Perkembangan sejarah mengenai media massa yang dipolitisasi memiliki perbedaan peran antara Orde Baru dengan Pasca Reformasi (Adryamarthanino, 2022).

Pemilihan umum tahun 2014 menjadi tonggak penting pemanfaatan media elektronik untuk kepentingan kampanye yang berakhir pada polarisasi masyarakat. Dua kandidat yang bertarung di pemilu 2014, kembali bertarung di pemilu 2019. Hal tersebut semakin menajamkan polarisasi di masyarakat, akibat narasi yang tersebar di media sosial (Gani, 2019). Dengan berkembangnya media sosial dan kehadiran generasi milenial yang semakin pesat dengan perkembangan teknologi, berkontribusi terhadap persebaran yang cepat dalam memberikan narasi politik sehingga memunculkan stagnasi di hampir semua kelompok usia. Karenanya, akibat yang ditimbulkan jelas mengarah

pada adanya polarisasi dan menghasilkan ambiguitas (Gani, 2019).

Narasi dalam media sosial juga turut memengaruhi bagaimana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 berlangsung, dimana terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Peran sosial media sangat memengaruhi generasi milenial untuk terlihat aktif dalam kontestasi perpolitikan Indonesia, baik sebagai pemilih maupun kandidat pemilihan umum (Utami, 2020). Salah satu yang mengundang banyak perhatian ialah Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan sebagai wali kota Solo dan Bobby Nasution yang mencalonkan diri sebagai wali kota Medan, Sumatera Utara. Walaupun keduanya merupakan garis keturunan dari presiden Joko Widodo, namun keduanya masih berusia kurang dari 40 tahun dan belum pernah terlibat aktif dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

Keputusan Gibran dan Bobby untuk maju sebagai wali kota, menjadi contoh bagaimana politik dinasti sedang berusaha dibangun oleh aktor politik nasional. Walaupun demokrasi tidak membatasi seluruh warga negara untuk bisa maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum, tetapi demokrasi yang esensial seharusnya berkorelasi positif terhadap terciptanya pluralisme aktor. Politik dinasti justru sebaliknya

karena dominasi aktor politik hanya berputar dalam satu atau beberapa keluarga dan lebih pada menciderai proses demokratisasi.

Terpilihnya Gibran dan Bobby tidak terlepas dari peran media sosial yang sangat dimanfaatkan sebagai media untuk kampanye politik. Pada saat yang sama, muncul narasi kontra yang berkembang di media sosial, seperti di Twitter dengan tagar #PolitikDinasti yang cukup populer pada masa kampanye, yakni dimulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Perang narasi dalam media sosial juga turut memengaruhi bagaimana pengguna yang didominasi oleh generasi milenial berpihak dalam politik.

Majunya Gibran Rakabuming dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020, erat dikaitkan dengan munculnya politik dinasti yang dengan gamblang tampil di hadapan perpolitikan Indonesia. Gibran yang tidak mempunyai pengalaman politik, justru mendapatkan rekomendasi dari PDI-Perjuangan, yang sebelumnya rekomendasi diberikan kepada calon wali kota petahana Kota Surakarta, Achmad Purnomo (Ningsih, 2020). Hanya berbekal elektabilitas yang tinggi karena pengaruh dari presiden Joko Widodo, Gibran dengan mudah mendapatkan rekomendasi untuk maju.

Hampir seluruh kalangan masyarakat Surakarta mengetahui siapa itu Gibran, putra sulung Presiden Jokowi yang mempunyai bisnis kuliner dengan pusat di Surakarta, tentu saja popularitas dari Gibran tak dapat lagi diragukan. Hal itu justru bertolak belakang dengan lawan Gibran yang maju dalam Pilkada Kota Surakarta. Bagyo Wahyono-FX Supardjo, pasangan independen yang maju tanpa diusung oleh partai politik mana pun. Hanya berbekal organisasi pengusungnya, Tikus Pithi Hanata Baris, pasangan Bagyo-Supardjo berani maju melawan Gibran-Teguh.

Perbandingan yang jauh dalam hal popularitas dari kedua pasangan calon tersebut, berbanding lurus dengan hasil Pilkada Kota Surakarta kemarin. Gibran-Teguh berhasil menang telak melawan pasangan Bagyo-Supardjo. Perbandingan suara sebanyak 85:15 persen dimenangkan oleh pasangan Gibran-Teguh.

Kontrasnya popularitas antara kedua pasangan calon tersebut, turut berpengaruh dalam meningkatnya angka golput yang terjadi di Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015. Pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2015, total persentase perolehan suara sah, yaitu 95,70% (Surakarta, 2015) sedangkan pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020,

yang baru saja terselenggara hanya mampu menggaet persentase suara sah sebesar 70,52% (Zamani, 2020).

Perolehan suara tidak sah dan perilaku politik pemilih untuk golput dalam Pilkada Kota Surakarta yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari adanya stereotip Gibran tentang politik dinasti dan juga tagar pro dan kontra terkait politik dinasti. Pengaruh sosial media yang begitu tinggi untuk memengaruhi perilaku politik masyarakat, terutama para golongan milenial yang aktif dalam bermedia sosial, menjadi kunci penting artikel ini.

Artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tagar #PolitikDinasti dan #GibranTeguh pada masa kampanye Pilkada 2020 terhadap preferensi politik dari masyarakat generasi milenial Kota Surakarta, dimana kandidat yang bertarung adalah putra dari presiden Jokowi yang notabene memiliki popularitas yang tinggi karena pengaruh kekerabatan melawan kandidat independen. Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat milenial pengguna sosial media dalam melihat wacana-wacana yang berkembang dalam tagar #PolitikDinasti dan #GibranTeguh dalam pengaruhnya terhadap preferensi politik mereka.

Pertanyaan yang berusaha untuk dijawab dalam topik penelitian ini adalah bagaimana wacana yang berkembang dalam tagar #PolitikDinasti dan #GibranTeguh memengaruhi preferensi politik para pengguna media sosial terutama masyarakat milenial Kota Surakarta. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan survei wawancara terhadap 25 narasumber yang termasuk dalam generasi milenial pengguna sosial media. Pengumpulan data sekunder melalui jurnal dan buku yang sesuai dengan topik penelitian juga dilakukan dalam validasi temuan data primer. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2022–24 April 2022 kepada 25 narasumber generasi milenial dan 1 narasumber dari perwakilan KPU Kota Surakarta.

Dalam penelitian ini, penulis mendasarkan kajian pada Morissan (2016) yang melihat partisipasi politik pengguna media sosial sebagai pemilih pemula cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa sebanyak 73,2% memberikan suara pada pemilihan legislatif 2014 dan 80% mempunyai keinginan besar untuk memberikan suara pada pemilihan presiden 2014. Hal itu memberikan pemahaman bahwa dalam kontestasi politik, media

sosial sangat berpengaruh pada meningkatnya tingkat partisipasi politik, dimana hal itu juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Menambahkan hal tersebut, Tasente (2015) menunjukkan pada saat kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2008, yaitu Barack Obama, terlihat hal tersebut merupakan awal mula media sosial digunakan sebagai media kampanye dan dianggap berhasil digunakan untuk mobilisasi dukungan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan internet untuk merekrut dan mengorganisasi 1,5 juta relawan melalui situs jejaring sosial agar pendukung terus terlibat aktif dalam mengampanyekan program kerja untuk tujuan kepentingan pemilu. Facebook adalah media sosial satu-satunya yang digunakan oleh Barack Obama dalam mengonsolidasikan massa untuk mengantarkannya ke kursi presiden Amerika Serikat tahun 2008 silam. Kendati demikian, dalam studi Tasente (2015) tidak bisa diimplementasikan dengan konteks negara yang mengalami perkembangan teknologi internet yang tertinggal.

Larsson and Moe (2012) menyebutkan bahwa pola kampanye melalui media sosial pada pemilu di Swedia pada tahun 2010 dinilai kurang efektif karena ada beberapa kandidat parlemen giat melakukan kampanye

di situs Twitter. Catatan utama studi menunjukkan bahwa pola kampanye melalui Twitter kurang dari 8% dari keseluruhan pengguna internet di media sosial. Hal serupa juga terjadi di Finlandia pada pemilu parlemen 2011, dimana pengaruh media sosial hanya pada tingkat moderat walaupun kampanye melalui media sosial gencar dilakukan oleh kandidat parlemen di Finlandia.

Beralih pada pengalaman di Indonesia, yaitu pemilu presiden tahun 2009 yang dimenangkan oleh SBY-Boediono, media sosial seperti Facebook ataupun Twitter, tidak terlalu digunakan secara signifikan dalam kampanye politiknya. Tetapi, tim kampanye SBY menggunakan media televisi dengan berciri khas kampanye lagu atau jingle. Baru pada tahun 2013, SBY mulai membuat akun media sosial pribadi untuk menyosialisasikan program kerjanya (Anshari, 2014).

Menambahkan beragam studi sebelumnya bahwa mediasosial yang erat kaitannya dengan generasi milenial yang semakin signifikan penggunaannya oleh kalangan politisi, membawa dampak pada peran dari partai politik untuk mulai mengekspansi dukungan pada masyarakat digital. Partai politik sebagai media rekrutmen politik mulai membuka dan menyosialisasikan pentingnya kaderisasi dan regenerasi dalam internal partai politik melalui jalur digital. Harris, Wyn, & Younes

(2010) dalam penelitiannya membuktikan bahwa generasi muda adalah kelompok yang dinilai paling peduli terhadap isu politik. Generasi muda mampu mengungkapkan preferensi dan minat mereka terhadap isu perpolitikan. Terlebih lagi dalam Bauman (2001) menambahkan jika pada masa lalu bentuk partisipasi politik generasi muda bersifat konvensional, seperti aksi turun ke jalan atau demonstrasi, maka partisipasi politik generasi muda saat ini lebih cenderung melalui internet dan media sosial yang bersifat individual, spontan, dan berdasarkan isu tertentu yang kurang terkait dengan perbedaan sosial. Hal itu terjadi karena pengaruh globalisasi dan individualisme.

Dengan menggunakan konsep rasionalitas oleh Baron (2008) dalam Rahmat Hidayat (2016), yaitu pemikiran yang berdasarkan keputusan matang dan dilandasi dengan informasi yang akurat dan objektif. Dalam berpikir rasional, seseorang akan membuat judgement berdasarkan penalaran yang logis dan dilakukan dengan membuat rencana pencapaian tujuan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya (Hidayat, 2016). Teori tersebut menjadikan tulisan ini mendasarkan landasan utama pada teori rasionalitas, dimana dalam pencapaian tujuan harus didasarkan

pada pengorbanan sekecil–kecilnya dan keputusan yang matang.

Jika dilihat dari konteks Indonesia, elite partai politik ataupun pemangku jabatan di pemerintahan sudah mulai dimasuki dari generasi milenial, yangmana mereka yang terpilih merupakan mereka yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya, Nadiem Anwar Makariem, mantan CEO sekaligus founder startup Gojek. Kini, ia telah dijadikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Staf khusus kepresidenan yang hanya diisi oleh kalangan milenial pun turut menjadi faktor penting yang digalakkan Jokowi sebagai upaya regenerasi istana.

Namun demikian, teori rasional Baron sepertinya sangat kompleks jika diimplementasikan dalam kehidupan politik di Indonesia. Politik Dinasti di Indonesia tidaklah serumit itu, tidak ada pengorbanan maupun keputusan yang matang dalam politik dinasti di Indonesia. Politik dinasti di Indonesia sudah selayaknya penyakit demokrasi yang terus menggerogoti tubuh pemerintahan. Para kerabat dari elite politik tidak segan-segan untuk maju mencalonkan diri melalui pemilu, tanpa ada rasa malu dalam beretika politik. Menurut Marcuz Mietzner dalam Martien Herna Susanti (2017) menjelaskan bahwa praktik politik dinasti di Indonesia

ternyata sangat menguntungkan bagi mereka yang masih satu kerabat dengan elit politik yang sedang atau telah menjabat, karena mereka relatif sangat mudah dalam memenangkan kekuasaan(Susanti, 2017).

Pada Pilkada tahun 2020 di Kota Solo, Gibran berhasil menang dengan perolehan suara lebih dari 80% suara masyarakat. Terlepas dari adanya pro dan kontra di sosial media yang mengatakan adanya politik dinasti lewat tagar #PolitikDinasti, penggunaan media sosial menurut Suwarno, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan kekuatan baru dalam pengaruh politik dengan menyajikan berbagai bentuk kreasi isu dan penyebaran narasi politik yang diatur dengan mesin propaganda yang bekerja secara otomatis (Tempo, 2018). Karenanya, hal ini relevan terhadap faktor kemenangan Gibran yang memanfaatkan branding media sosialnya dengan baik, ditambah lagi adanya warisan legitimasi yang diturunkan dari presiden Jokowi, membuat Gibran unggul suara lebih dari 80% terhadap lawannya. Padahal, tagar #PolitikDinasti terus saja berkembang dengan narasi-narasi yang bermacam-macam.

## **DASAR PENGARUH WACANA MEDIA SOSIAL TERHADAP PREFERENSI POLITIK**

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori tindakan rasional yang dikemukakan oleh Weber, teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas (1962), dan teori preferensi politik dari Freed Greenstein (1975). Konsep tersebut digunakan untuk melihat bagaimana cara bekerja dari wacana tagar #PolitikDinasti dan #GibranTeguh dengan melihat dampak dari wacana tersebut terhadap preferensi politik dari masyarakat milenial pengguna sosial media pada Pilkada tahun 2020 Kota Surakarta.

### **1. Teori Ruang Publik**

Istilah mengenai ruang publik sebenarnya mengacu pada tempat dimana terjadi segala aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Adapun yang dimaksud “ruang” dalam ruang publik adalah wadah yang harus mampu menyediakan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya syarat interaksi, yaitu kontak dan komunikasi sosial. Menurut Stephen Carr (1992) dalam Hansen Hartoyo (2013), ruang publik yang ideal harus mencakup tiga hal, yaitu responsif, demokratis, dan bermakna. Dalam hal ini, ruang publik harus dapat digunakan oleh kepentingan masyarakat

luas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta akses ke seluruh masyarakat umum dan juga harus memiliki hubungan antara manusia, ruang, dan tujuan sosial (Hartoyo, 2013).

Konsep mengenai ruang publik ini diperkenalkan oleh Habermas dalam bukunya yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1962) yang membahas mengenai adanya transformasi dan kehancuran rasionalitas ruang publik yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20 di Eropa. Konsep ruang publik yang seharusnya menjadi tempat interaksi sosial di masyarakat, justru mengalami pengekangan kebebasan dan dominasi oleh kelompok borjuis.

Dalam konteks historis, konsep mengenai ruang publik dimulai pasca holocaust di Jerman, dimana saat itu terjadi perubahan politik menuju masyarakat yang demokratis. Demokratis di sini tidak diartikan sebagai suara mayoritas, tetapi menekankan adanya proses diskusi melalui pertimbangan dan alasan yang rasional sehingga terciptalah ruang-ruang publik dalam elemen masyarakat. Tetapi, Habermas melihat bahwa pada periode tersebut, ruang publik pada kenyataannya hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok borjuis dan tidak seluruh elemen masyarakat memiliki suara setara serta tidak adanya ekualitas. Karenanya, Habermas membuat

konsep mengenai ruang publik ini sebagai ruang yang dapat digunakan untuk setiap elemen masyarakat agar dapat berkontribusi sebagai kerangka yang esensial dalam masyarakat yang demokratis (Midgley, 2012).

Seiring perkembangan zaman, teknologi dan internet kemudian turut memainkan peran penting dalam perkembangan ruang publik. Internet dan kemunculan berbagai produk media sosial lainnya memungkinkan setiap orang mendapatkan akses informasi dan membagikannya. Hal ini dapat berdampak juga terhadap meningkatnya proses–proses demokrasi yang lebih aktif dan partisipatif terhadap seluruh elemen masyarakat. Sejalan dengan konsep ruang publik ala Habermas, ruang publik dapat dipergunakan oleh seluruh elemen masyarakat dengan tetap mengutamakan prinsip keterlibatan dan kontribusi dari masyarakat tersebut dalam melakukan pengambilan kebijakan. Setiap informasi ataupun keputusan politik yang dibuat harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya terpusat pada sekelompok elite politik.

Dengan adanya penetrasi internet yang merambah para pengguna di media sosial, menjadikan teknologi internet sebagai media transformasi ruang publik dari wadah konvensional menjadi keterlibatan langsung oleh masyarakat digital. Munculnya ruang publik yang

dihadirkan melalui perkembangan teknologi internet, turut menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang semakin mengartikulasikan kepentingan publik secara lebih luas. Namun, yang menjadi kritik adalah representasi demokrasi tidak berjalan maksimal karena tidak ada suatu konstituen yang dapat menjalankan kontrol terhadap wakil dalam dunia digital. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Soeseno (2013) bahwa pada konteks demokrasi modern seperti pada saat ini dengan maraknya penggunaan media sosial, representasi demokrasi tidak berjalan maksimal karena posisi wakil rakyat yang menjadi saluran representasi publik antara ada dan tiada (*being present and yet not present*) (Soeseno, 2013).

## **2. Teori Tindakan Rasional**

Konsep mengenai tindakan rasional dibagi menjadi dua, yaitu tindakan dan rasionalitas. Ketika individu melakukan suatu kegiatan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan dipengaruhi oleh situasi tertentu, itulah yang disebut dengan tindakan. Sedangkan rasionalitas merupakan suatu tindakan yang memaksimalkan utilitas yang diterima dalam aktivitas produktif serta menganggap keteraturan sosial adalah resultan kompleks dari tindakan individu (Scott, 2012).

Teori mengenai tindakan rasionalitas ala Weber ini dilandasi oleh paradigma bahwa tindakan rasional tidak akan terlepas dari tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Weber ini memiliki makna bahwa tindakan sosial berupa tindakan nyata yang diarahkan kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu, bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh situasi tertentu (Prastowo, 2008).

Dalam hubungan sosial yang ada di masyarakat dan suatu negara, selalu ada pengorganisasian. Pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui adanya wewenang. Weber menyebutnya sebagai rasional formal. Pemilu dilakukan untuk menentukan pemimpin atas dasar keputusan hukum dari masyarakat dengan pola rasional ala Weber, yaitu mengacu pada tipe Otoritas Legal-Rasional. Otoritas Legal-Rasional merupakan rasional formal yang terorganisasi yang legal dan bersumber dari peraturan yang diberlakukan secara hukum dan rasional. Secara tidak langsung, teori ini mengemukakan bahwa dalam pemilihan umum akan ada tindakan-tindakan sosial untuk memengaruhi orang lain demi mencapai atau mempertahankan wewenang yang diakui melalui otoritas formal.

### **3. Teori Preferensi Politik**

Preferensi politik merujuk pada pilihan seseorang untuk menentukan pilihan politiknya sesuai dengan kehendak dan nilai-nilai yang diyakini oleh individu terkait. Fred Greenstein (1975) menjelaskan bahwa preferensi politik seseorang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respons politik yang ada pada diri seseorang tersebut (Greenstein, 1975).

Tindakan politik yang diyakini oleh individu terkait menjadi faktor penentu utama dalam merespons situasi politik yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, preferensi politik bias dikatakan sebagai rasionalisasi pilihan politik seseorang untuk mempertahankan pilihan politiknya dengan berusaha memaksimalkan manfaat yang diharapkan dari kesempatan dalam persaingan pilihan yang dihadapinya. Rasionalisasi pilihan politik ini mengandalkan pada orientasi informasi yang diperolehnya dengan berbagai faktor yang dipertimbangkan (Himmelweit, 1981).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kombinasi studi literatur dengan wawancara kepada masyarakat di Kota Surakarta, yaitu kelompok generasi milenial

dengan total narasumber sebanyak 25 orang. Pilihan penggunaan metode tersebut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan data dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya dengan memanfaatkan studi literatur untuk menghasilkan preferensi politik publik terhadap pertarungan wacana antara #PolitikDinasti dan #GibranTeguh kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang termasuk kategori milenial di Kota Surakarta sebagai responden. Selanjutnya dalam hal teknik analisis data, tulisan ini menggunakan metode Discourse Analysis, yakni dengan mengambil data secara langsung melalui komunikasi wawancara tanpa memengaruhi opini dari objek wawancara. Hal ini dilakukan untuk melihat opini publik terhadap tagar #PolitikDinasti dan #GibranTeguh, apakah opini yang tersebar di media sosial turut memengaruhi preferensi politik masyarakat, terutama pemilih yang termasuk dalam kategori generasi milenial.

Kota Surakarta dikenal sebagai basis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selama 10 tahun terakhir karena pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif yang dilaksanakan tahun 2014 dan

2019, lebih dari 80% suara untuk pemilu presiden dan 80% kursi legislatif dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada Pilpres 2014, Jokowi–Jusuf Kalla berhasil meraup 84,30% suara dan pada Pilpres 2019, Jokowi–Ma’ruf Amin berhasil menang telak dengan perolehan suara sebesar 82,22% suara. Untuk kursi legislatif di Kota Surakarta, juga didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 30 kursi dari 45 kursi legislatif yang tersedia.

Pilkada 2020 kota Surakarta menghasilkan kemenangan bagi pasangan Gibran dan Teguh dengan perolehan suara sebesar 225.451 suara atau 86,5% sedangkan Bajo hanya memperoleh suara sebanyak 35.055 suara atau sebesar 15,5%, sementara perolehan total suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Solo sebanyak 418.283 suara (Isnanto, 2020). Kemenangan ini tidak lepas dari dukungan generasi milenial yang sadar akan media sosial. Menariknya adalah ciri khas blusukan dari Jokowi tetap menjadi senjata kampanye pamungkas Gibran. Perbedaannya terletak pada perubahan dari offline menjadi online akibat dari masa Pandemi Covid-19.

Pengaruh pandemi Covid-19 berakibat pada efektivitas dari media sosial yang digunakan untuk

strategi politik. Hal itu berimbas pada rendahnya angka pemilih pada Pilkada Kota Surakarta 2020 yang gagal memenuhi target sebesar 77% suara. Tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 70,52%. Jumlah suara sah sebanyak 260.532 suara dan tidak sah sebanyak 35.476 suara. Adapun jumlah DPT Solo ada sebanyak 418.283 pemilih. Hal tersebut terjadi penurunan yang signifikan terkait partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan Pilkada Kota Surakarta tahun 2015, dimana pada Pilkada 2015, partisipasi pemilih mencapai 73,6% suara masuk dengan total suara tidak sah hanya sebanyak 12.773 suara. Hampir terjadi kenaikan angka golput tiga kali lipat. Hal itu juga sebanding dengan data wawancara, sebanyak 16 dari 25 narasumber menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan hak dalam menentukan suaranya dalam Pilkada 2020 atau disebut Golongan Putih (Golput).

## **KAITAN ANTARA MEDIA SOSIAL DENGAN RASIONALITAS PEMILIH GENERASI MILENIAL**

Media sosial dan narasi yang berkembang di dalamnya dinilai efektif dalam memengaruhi massa. Munzir dan Zetra (2019) mengatakan bahwa kuatnya peran media sosial dalam dunia politik membantu

generasi muda untuk meleak politik dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula tidak dapat dihindari (Nureza Ade Saputra, 2020). Hal ini merupakan konsep utama dalam tulisan ini bahwa media sosial memiliki dampak dalam memengaruhi bagaimana partisipasi politik generasi milenial (bagaimana rasionalitas generasi milenial dalam mengaitkan antara narasi di media sosial dengan realitas yang ada).

Media sosial dianggap sebagai ruang publik baru yang memengaruhi preferensi politik dan tingkat pengetahuan generasi milenial dalam menentukan pilihan politiknya. Tingginya akses generasi milenial terhadap penggunaan media sosial membuat para politisi ikut aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik mereka. Dengan media sosial, tokoh politik dapat menciptakan ruang dialog baru antara politisi dengan konstituen untuk menarik minat pemilih generasi milenial (Febriani, 2020).

Adanya dialog dalam ruang publik baru di media sosial inilah yang kemudian mengharuskan konstituen untuk bisa bertindak secara rasional dalam menentukan bagaimana preferensi politik mereka.

## **STRATEGI KEMENANGAN GIBRAN TERHADAP STEREOTIP POLITIK DINASTI YANG MELEKAT**

Blusukan yang merupakan ciri khas dari mantan wali kota Surakarta, Jokowi, tetap dibawa oleh Gibran dalam masa kampanye Pilkada 2020. Tetapi, karena masa pandemi COVID-19, Gibran mengakalinya dengan virtual box yang berisi layar yang dapat digunakan untuk blusukan online. Lantas, hal ini turut menjadi hal menarik karena makna dari blusukan yang lebih dekat dengan masyarakat tetap dibawa oleh Gibran agar karakter karismatik dan wong cilik Jokowi tetap terlihat dalam karakter Gibran. Strategi–strategi Gibran yang mengadopsi dari ayahnya inilah yang kemudian membawanya menuju panggung kemenangan Pilkada 2020 Kota Surakarta.

Pada masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh kegiatan, termasuk kampanye, dilaksanakan secara virtual, kampanye menggunakan media sosial menjadi strategi utama. Branding media sosial dari Gibran cukup lebih memuaskan dibandingkan dengan lawannya. Hal ini dibuktikan dengan followers instagram dari Gibran yang mencapai 712 ribu pengikut. Sementara itu, pasangan lawannya tidak menggunakan

media sosial sebagai branding utamanya, hanya mengandalkan relawan dan organisasi pengusungnya, Tikus Pithi.

Berdasarkan hasil dari survei wawancara terhadap 25 narasumber masyarakat milenial kota Surakarta, sebanyak 19 menyatakan bahwa mereka mengetahui branding dari media sosial Gibran. Berbanding terbalik dengan hasil bagaimana media sosial dalam memengaruhi preferensi politik pemilih generasi milenial yang justru tidak terpengaruh dengan branding sosial media Gibran tersebut. Tingginya popularitas dari Gibran melalui media sosial yang berbanding terbalik dengan tidak terpengaruhnya preferensi politik masyarakat milenial, ternyata turut dipengaruhi citra negatif dengan adanya stereotip Gibran pada politik dinasti yang melekat.

*“Walaupun media sosial Gibran cukup bagus, tapi Gibran tetap saja dipandang sebagai anaknya pak Jokowi, kasihan sama pak Purnomo (Mantan Wakil Wali Kota Surakarta), track recordnya bagus di Solo tapi kalah sama anaknya presiden,” ucap Taufiq Randi, warga kecamatan Serengan, Surakarta.*

Sama seperti pernyataan Taufiq, sebanyak 23 dari 25 narasumber juga terpengaruh dengan stereotip tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa politik

dinasti dan narasi tentang politik dinasti yang tersebut melalui media sosial sangat memengaruhi bagaimana masyarakat milenial membuat preferensi politik mereka pada Pilkada 2020.

Kandidat Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa yang diunggulkan dalam hal elektabilitas karena merupakan putra dari presiden Jokowi dan juga mantan wali kota Surakarta yang dikenal dekat dengan masyarakat karena konsep blusukan-nya, ternyata justru menjadi bumerang tersendiri bagi Gibran untuk memengaruhi masyarakat milenial pengguna internet di Kota Surakarta. Warisan karismatik yang dilanjutkannya dari sosok ayahnya, yaitu melalui konsep blusukan seakan mendarah daging pada karakter Gibran sehingga masih banyak masyarakat yang mempercayai karakter Gibran sama persis dengan karakter Jokowi. Mengutip dari Wawan Mas'udi (2017) dalam Novia Ihza (2021) menemukan fakta bahwa “effectiveness of Jokowi’s policies on basic public services and urban informality helped him to create legitimacy, in part because they protected the common interests of the people”. Legitimasi itu terus dirawat dengan blusukan (Novia, 2021). Dalam hal ini berarti Gibran secara tidak langsung mendapatkan sebuah warisan legitimasi dari ayahnya yang merupakan mantan wali kota Surakarta

yang berpengaruh terhadap kemenangannya dalam Pilkada 2020 Kota Surakarta.

## **TAK DIKENAL, MINIM MODAL POLITIK, BAGAIMANA STRATEGI BAJU UNTUK MENANG?**

Pasangan Bagyo-Supardjo merupakan pasangan independen yang maju melalui dukungan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) pengusungnya, yaitu Tikus Pithi Hanata Baris. Ormas ini yang kemudian dikabarkan akan mendeklarasikan menjadi Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Walaupun akan mendeklarasikan menjadi sebuah partai politik, tetapi pengalaman dalam kancah politik praktisnya dinilai cukup kurang karena gagal membawa pasangan Bagyo-Supardjo dalam Pilkada 2020 Kota Surakarta dan terpaut angka yang cukup jauh.

Kekalahan pasangan Bagyo-Supardjo jika ditilik dari segi strategi kampanyenya, hanya mengandalkan cara-cara komunikasi satu orang ke orang lain, baik secara langsung melalui ormas pengusung maupun ponsel pribadi. Padahal, pada masa kampanye Pilkada 2020 silam adalah masa pandemi COVID-19 yang melarang masyarakat untuk berkerumun. Karenanya, strategi yang dilakukan oleh tim pemenangan Bagyo-Supardjo

belum cukup untuk meraup suara masyarakat Kota Surakarta.

Strategi Bajo untuk menang dalam Pilkada 2020 pun tak seserius pasangan Gibran-Teguh. Menurut hasil riset media sosial, hanya ditemukan satu jenis akun media sosial kampanye Bagyo-Supardjo di Instagram dengan nama @bolone.bajo. Akun media sosial tersebut telah diikuti oleh 1177 pengikut dengan membawa slogan “Koalisi Rakyat untuk Solo Bermartabat”. Walaupun dirinya sadar bahwa lawannya adalah putra presiden Jokowi yang memiliki warisan legitimasi yang kuat di masyarakat Surakarta, strategi Bajo hanya sebatas mengandalkan relawan dan simpatisan dari organisasi pengusungnya. Wajar ketika masyarakat mencurigai adanya indikasi makelar politik karena tidak ada strategi khusus untuk mengalahkan Gibran, termasuk branding melalui media sosial yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil survei wawancara terhadap 25 narasumber masyarakat milenial Kota Surakarta, sebanyak 24 orang mengaku tidak mengetahui dan tidak mengikuti perkembangan politik dari kandidat Bagyo-Supardjo selama masa kampanye. Sedangkan satu orang yang mengetahui adanya pasangan tersebut adalah tetangga dari FX Supardjo yang bertempat

tinggal di daerah Pajang, Laweyan. “Saya tahu Pak Pardjo mau maju itu ya sejak awal karena beliau kan ketua RW di sini, otomatis tempatnya selalu ramai, selalu jadi basecamp, banyak spanduk–spanduk dipasang di sekitar sini,” pernyataan dari Muhammad Risyad, warga Bendosari, Pajang.

Kurangnya elektabilitas dari pasangan Bagyo-Supardjo berdampak pada perolehan suara pasangan Bagyo-Supardjo dalam rekapitulasi suara Pilkada 2020 yang hanya berhasil memperoleh suara sebesar 35.054 suara, kalah dari jumlah suara tidak sah.

Berdasarkan data dari Tirto.id (2020), strategi–strategi yang ditempuh oleh Bagyo-Supardjo dalam mengumpulkan dana maupun syarat dukungan dalam masa kampanye, diakuinya berasal dari dua organisasi besar, yaitu Yayasan Surya Nuswantara dan Tikus Pithi Hanata Baris, yang merupakan organisasi pengusung pasangan Bagyo-Supardjo. Dana kampanye diperoleh dari iuran dan loyalitas kader organisasi untuk tim kemenangan. Sedangkan strategi utama yang digunakan oleh pasangan Bagyo-Supardjo untuk kampanye selama pandemi hanya bermodalkan komunikasi satu per satu dengan konstituen dengan satu ponsel pribadi (Baskara, 2020).

## **DAMPAK WACANA MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMILIH GENERASI MILENIAL**

Media sosial menjadi sarana yang tepat dan murah yang dimanfaatkan oleh KPU Kota Surakarta dalam membantu menyosialisasikan Pilkada 2020 melalui berbagai poster maupun pamflet. Dalam wawancaranya, Arum (Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, KPU Kota Surakarta) menjelaskan bahwa ada strategi–strategi tertentu yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta untuk menyosialisasikan Pilkada 2020, seperti pembentukan Relawan Demokrasi (Gerak Pasti) yang khusus untuk menysasar pemilih pemula maupun generasi milenial pada setiap komunitas yang ada di Kota Surakarta, sosialisasi menggunakan Jingle dan Maskot Pilkada 2020, dan pemasangan alat peraga sosialisasi, seperti spanduk, banner, dan videotron.

Lebih lanjut, KPU Kota Surakarta juga mengetahui adanya wacana #PolitikDinasti dan #GibranTeguh dalam media sosial, tetapi KPU Kota Surakarta tidak mengindahkan adanya pertarungan wacana di media sosial terkait adanya tagar #PolitikDinasti dan #GibranTeguh yang turut mewarnai bagaimana kampanye hingga hari pelaksanaan Pilkada dilaksanakan. Sebab, pertarungan wacana dengan

tagar yang ada di media sosial merupakan suatu bentuk ekspresi dari demokrasi.

Menurut data yang dihimpun dari Drone Emprit Academy, selama tahun 2020 dalam media sosial Twitter, #PolitikDinasti telah dilakukan cuitan sebanyak 1.165 tweet, dengan dominasi oleh sentimen negatif (660 tweet), positif (356 tweet), dan netral (149 tweet). Sedangkan #GibranTeguh hanya dilakukan cuitan sebanyak 36 cuitan, yang didominasi oleh tweet dari akun-akun media sosial kampanye dan tweet terkait ucapan kemenangan Gibran-Teguh pasca Pilkada 2020 Kota Surakarta terselenggara.

### **Data Jumlah Pemilih Tetap Berdasarkan Usia yang Termasuk Generasi Milenial**

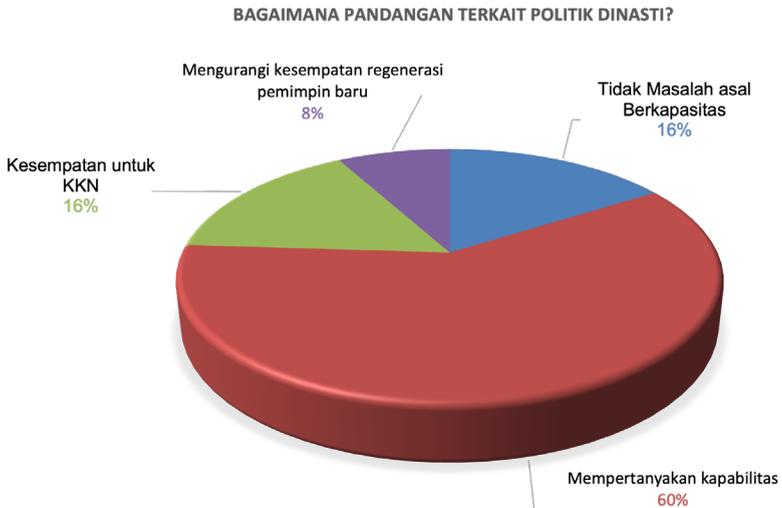
No.	Kriteria Pemilih	Jumlah
1.	Kurang dari 17 tahun dan sudah menikah	22 orang
2.	Usia 17 tahun – 20 tahun	26.410 orang
3.	Usia 21 tahun – 30 tahun	84.084 orang
4.	Usia 31 tahun – 40 tahun	84.479 orang
Total pemilih		194.995 orang

Sumber: KPU Kota Surakarta

Berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihimpun dari KPU Kota Surakarta, pemilih yang tergolong generasi milenial mencapai 194.995 orang atau hampir mencapai 50% dari total suara yang masuk pada Pilkada 2020. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa suara dari generasi milenial sangat memengaruhi dalam pertarungan Pilkada 2020 Kota Surakarta. Dengan demikian, Gibran yang terpilih sebagai wali kota Surakarta juga dipengaruhi oleh kampanyenya yang menasar pada masyarakat internet (netizen) di Kota Surakarta, terlepas dari pro dan kontra wacana #PolitikDinasti dan #GibranTeguh di media sosial.

### **Diagram Data Wawancara terhadap 25 Narasumber**





Berdasarkan data hasil wawancara, adanya pertarungan wacana di media sosial sebanyak 68% menjawab bahwa media sosial dan #PolitikDinasti yang melekat dengan Gibran turut memengaruhi preferensi politik masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena dua sentimen, yaitu sentimen negatif dan netral. Sentimen negatif terhadap adanya stereotip politik dinasti yang melekat pada Gibran, yaitu mempertanyakan tentang kapabilitas, adanya kesempatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menutup kesempatan regenerasi pemimpin baru. Sedangkan untuk sentimen netral hanya mengatakan bahwa tidak masalah jika pemimpin yang lahir dari politik dinasti itu berkapasitas.

Walaupun mayoritas responden hanya sebagai pengguna pasif dalam bersosial media, tetapi narasi yang berkembang di media sosial cukup memengaruhi preferensi politik dari masyarakat internet (netizen) dalam menentukan pilihannya.

## **KESIMPULAN**

Adanya wacana pro dan kontra antara pendukung Gibran-Teguh dengan membawa tagar #GibranTeguh yang gencar membuat narasi penolakan penyebutan Gibran sebagai Politik Dinasti, dengan pendukung politik dinasti yang notabene adalah orang-orang yang tidak menyetujui Gibran untuk maju dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 dengan tagar kontra, yaitu #PolitikDinasti, menjadi salah satu pengaruh terhadap preferensi politik masyarakat terutama para pengguna sosial media untuk lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2020.

Tulisan ini menemukan hal baru, yaitu pengaruh pertarungan wacana antara #PolitikDinasti dan #GibranTeguh terhadap preferensi politik masyarakat milenial Kota Surakarta cukup tinggi. Walaupun Pilkada 2020 Kota Surakarta tetap saja dimenangkan oleh pasangan Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa, tetapi berdasarkan survei penelitian, menunjukkan

hasil bahwa mereka lebih memilih tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020 Kota Surakarta. Hal ini jelas menunjukkan bahwa media sosial walaupun sebagai media kampanye utama yang paling efektif pada masa pandemi, jika terjadi suatu wacana pro dan kontra terhadap salah satu kandidat, hal tersebut rupanya lebih memengaruhi preferensi politik masyarakat, terutama masyarakat pengguna internet. Kampanye melalui media sosial yang lebih gencar dilakukan oleh pasangan Gibran-Teguh daripada pasangan Bagyo-Supardjo, juga tak menutup kemungkinan bahwa kampanye media sosial ini tidak cukup berpengaruh terhadap masyarakat milenial untuk tetap memilih pasangan Gibran-Teguh.

Kemenangan dari pasangan Gibran-Teguh cukup dijelaskan melalui elektabilitasnya yang tinggi karena pengaruh dari presiden Jokowi dan minimnya modal politik yang dibawa oleh Bagyo-Supardjo. Karenanya, dengan bermodalkan elektabilitas dan loyalitas anggota PDI-P di Kota Surakarta, cukup untuk memengaruhi kemenangan dari pasangan Gibran-Teguh, dan tidak cukup banyak memengaruhi preferensi politik pemilih rasional atau dalam hal ini adalah masyarakat milenial pengguna media sosial.

## REFERENSI

- Adryamarthanino, Verelladevanka. (2022). Pemberedelan Media Massa pada Masa Orde Baru. Kompas.com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/21/110000079/pemberedelan-media-massa-pada-masa-orde-baru?page=all>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 16.43.
- Amal, I. (1996). Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Baskara, A. (2020). Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi. Tirto dan Kurawal Foundation, 2.
- Dalimunthe, Maulana Andinata. (2018). Implikasi Internet sebagai Media Interaktif dalam
- Membangun Citra Aktor Politik. Al-Munzir. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/download/810/739>. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Febriani, S Nufian. (2020). Preferensi Media Sosial Generasi Milenial pada Tingkat Pengetahuan Calon Legislatif. NYIMAK: Journal of Communication, Vol. 4 No 1, Maret 2020.

- Gani, Erbert. (2019). Berebut Generasi Digital. Atmajaya.ac.id. <https://m.atmajaya.ac.id/web/kontenunit.aspx?gid=riset-publikasi-unit&ou=ipp&cid=publikasigani>. Jakarta: Atma Jaya Institute of Public Policy.
- Hartoyo, Hansen. (2013). Kriteria Ruang Publik Kalijodo Pendukung Aksesibilitas dan Peningkatan Aktivitas. *Jurnal Teknik Arsitektur ARTEKS*, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2018, Hal. 114.
- Hidayat, Rahmat. (2016). Rasionalitas: Overview terhadap Pemikiran dalam 50 Tahun Terakhir. *Buletin Psikologi*, Vol. 24, No. 2, Hal. 103.
- Ihza, Novia. (2021). Memenangkan Anak Presiden: Mengapa Gibran Rakabuming Memenangkan Pilkada Kota Surakarta 2020? Skripsi.
- Isnanto, B. A. (2020). Sisi Lain Kemenangan Gibran di Rekapitulasi Pilkada Solo. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5302636/sisi-lain-kemenangan-gibran-di-rekapitulasi-pilkada-solo>.
- Midgley, D. (2012). *Beyond Habermas: Democracy, Knowledge and the Public Sphere* (1st ed.). London: British Library.

- Ningsih, L. (2020). Rekomendasi Takhta Jatuh ke Tangan Gibran, Achmad Purnomo Kecewa. *Warta Ekonomi*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read295430/rekomendasi-takhta-jatuh-ke-tangan-gibran-achmad-purnomo-kecewa>.
- Prastowo, R. (2008). *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Saputro, F. A. (2020). Perludem Sebut 4 Faktor Penyebab Munculnya Politik Dinasti. *Republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/qe7iil354/perludem-sebut-4-faktor-penyebab-munculnya-politik-dinasti>.
- Scott, J. (2012). *Teori Sosial (1 ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soesono, N. (2013). *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori (1st ed.)*. Depok: Puskapol Universitas Indonesia.
- Utami, Fitria. (2020). Media Sosial dan Partisipasi Politik Milenial Riau. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1 Januari 2020.